



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Oni Choiruddin, S.H., M.M.
Jabatan : Deputi Bidang Persidangan
selaku Deputi Bidang Persidangan DPD RI, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 5 Februari 2026

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

PIHAK PERTAMA



Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
NIP. 197206171993031003



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PUSAT PERANCANGAN DAN KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk legislasi RUU	Nilai tertimbang dukungan keahlian legislasi RUU sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₁₂₁)	0,06
2	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk Pandangan dan Pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₂₂₁)	0,004
3	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan dan Agama	Nilai tertimbang dukungan keahlian untuk pertimbangan atas RUU mengenai Pajak, Pendidikan, dan Agama sesuai standar yang ditetapkan (K ₁₄₂₁)	0,021
4	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan sesuai standar yang ditetapkan atas bahan masukan terhadap RUU inisiatif DPD RI dan pandangan dan pendapat atas RUU Usul Pemerintah atau DPR serta masukan atas perubahan kebijakan Pemerintah (K ₂₁₂₂)	0,033
5	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk hasil pengawasan atas pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Indeks Reformasi Hukum (K ₂₁₂₄)	0,200
6	Meningkatnya kualitas dukungan keahlian untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang masukan terhadap RUU Inisiatif sesuai standar yang ditetapkan untuk masukan terhadap RUU Inisiatif atas pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU (K ₂₂₂₁)	0,155
7	Meningkatnya kualitas dukungan bahan untuk tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi atas Ranperda dan Perda sesuai ASMASDA	Nilai tertimbang aspirasi masyarakat dan daerah yang terhimpun sesuai standar yang ditetapkan untuk penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi Ranperda dan Perda sesuai dengan standar yang ditetapkan (K ₂₃₁₁)	0,015

	Kegiatan / RO	Anggaran
A.	Penyelenggaraan fungsi legislasi DPD RI	Rp 2.164.371.000
1	002 - Rekomendasi kebijakan Atas Penyelenggaraan Fungsi Legislasi dan RUU DPD RI	Rp 1.870.101.000
	003 - Rekomendasi Kebijakan Atas Pandangan dan Pendapat atas RUU dari Pemerintah dan DPR	Rp 196.180.000
	004 - Rekomendasi Kebijakan pertimbangan DPD RI atas Rancangan Undang-Undang Lainnya	Rp 98.090.000
B.	Penyelenggaraan fungsi pengawasan DPD RI	Rp 1.342.108.000
1	010 - Rekomendasi Kebijakan atas Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Rp 477.350.000
2	011 - Rekomendasi Isu Strategis hasil Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	Rp 198.485.000
3	012 - Rekomendasi Kebijakan Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-undang	Rp 666.273.000
4	007 - Laporan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah	-
C.	Pemasyarakatan produk hukum DPD RI	Rp 2.369.521.000
1	002 - Informasi Kebijakan Hukum	Rp 2.369.521.000

PIHAK KEDUA



Oni Choiruddin, S.H., M.M.
NIP. 196804291997031001

Jakarta, 5 Februari 2026

PIHAK PERTAMA



Sanherif Sojuangon Hutagaol, S.Sos., M.Si.
NIP. 197206171993031003